

**PENGARUH KEBIJAKAN PENENGGELAMAN
KAPAL TERHADAP EKSPOR PERIKANAN
TANGKAP INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

Ayub Ahmad Arnanto

2015110048

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG**

2020

THE EFFECT OF SINKING SHIP POLICY ON INDONESIA'S CAPTURE FISHERY EXPORTS



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

By:

Ayub Ahmad Arnanto

2015110048

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**

Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2020

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
TERHADAP EKSPOR PERIKANAN TANGKAP
INDONESIA

Oleh:

Ayub Ahmad Arnanto
2015110048

Bandung, Juni 2020

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia Savitri Mokoginta, Ph.D.

Pembimbing,

Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ayub Ahmad Arnanto
Tempat, tanggal lahir : Garut, 21 September 1996
NPM : 2015110048
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

PENGARUH KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP EKSPOR PERIKANAN TANGKAP INDONESIA

Pembimbing : Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 9 Juli 2020

Pembuat pernyataan:



(Ayub Ahmad Arnanto)

ABSTRAK

Kebijakan Penenggelaman Kapal merupakan kebijakan untuk memberantas pencurian yang dilakukan oleh kapal asing dan mencegah terjadinya *overfishing* di wilayah perairan Indonesia yang mulai diberlakukan pada tahun 2014. Namun kebijakan tersebut cenderung memunculkan perdebatan dimana sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, ekspor perikanan tangkap Indonesia cenderung menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap ekspor perikanan tangkap Indonesia ke enam negara tujuan yaitu Tiongkok, Jepang, Malaysia, Amerika, Singapura, dan Hongkong dengan menggunakan variabel kontrol yaitu PDB per kapita negara importir, harga rata-rata perikanan tangkap, dan nilai tukar. Teknik estimasi yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data panel pada rentang tahun 2005-2019. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kebijakan Penenggelaman Kapal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor perikanan tangkap. PDB per kapita negara importir memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor perikanan tangkap, nilai tukar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor perikanan tangkap. Harga rata-rata perikanan tangkap memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ekspor perikanan tangkap.

Kata kunci: Perikanan Tangkap, Kebijakan Penenggelaman Kapal, Ekspor, Harga, Nilai Tukar, PDB per Kapita

ABSTRACT

The Sinking Ships Policy is a policy to eradicate theft by foreign vessels and prevent overfishing in Indonesian territorial waters which came into effect in 2014. However, the policy has tended to create debate where since the adoption of this policy, Indonesia's capture fishery exports have tended to decline. The purpose of this study is to analyze the effect of the Sinking Ships Policy on Indonesia's capture fishery exports to six destination countries namely China, Japan, Malaysia, America, Singapore and Hong Kong using control variables namely GDP per capita of the importing country, the average price of capture fishery, and the exchange rate. Estimation technique is used Ordinary Least Square (OLS) with panel data in the range of 2005 – 2019. The results of the data analysis show that the Sinking Ships Policy has a negative and significant impact on the capture fishery exports. The GDP per capita of the importing country has a positive and significant influence on capture fishery exports, the exchange rate has a positive and significant effect on capture fishery exports. The average price of capture fishery has no significant effect on capture fishery exports.

Keyword: Capture Fishery, Sinking Ships Policy, Export, Price, Exchange Rate, GDP per Capita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kebijakan Peneggelaman Kapal Terhadap Ekspor Perikanan Tangkap Indonesia**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis terima sebagai bentuk masukan untuk di masa yang akan datang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait dalam membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Alhamdulillah wa Syukurillah, terimakasih kepada Allah S.W.T atas ridho dan pertolonganmu skripsi ini dapat selesai.
2. Terima kasih kepada kedua orangtua yang senantiasa selalu memberikan dukungan secara moril maupun materiil dalam pendidikan anaknya. Terima kasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan agar anaknya selalu mendapat yang terbaik.
3. Terima kasih kepada ibu Noknik selaku dosen pembimbing yang tulus, baik hati, dan sabar selalu membimbing penulis.
4. Terima kasih kepada ibu Miryam selaku dosen wali serta dosen-dosen Unpar lain yang telah membimbing dan memberikan berbagai ilmu selama penulis menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman DN Community, Firman, Dzikri, Cipman, Heri dan Asep yang selalu menjadi tempat sharing mengenai perkuliahan, perwanitaan, persoalan hidup dan persoalan bisnis. Terima kasih juga telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan penulis di jurusan Ekonomi Pembangunan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya dikarenakan akan terlalu panjang kata pengantar ini jika disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh teman discord yang selalu menghibur ketika penulis mengerjakan skripsi. Terima kasih juga karena membuat penulis terpancing untuk menghabiskan uang untuk DN.
8. Terima kasih kepada Billie Eilish, Muse, The Radio, BLACKPINK, Red Velvet, Alan Walker, Kodaline, Secondhand Serenade, Michael Jackson, Dream

Theater, Alter Bridge, Fiersa Besari, dan musisi-musisi lain yang ada di playlist spotify penulis karena selalu menemani pengerjaan skripsi ini.

Bandung, 9 Juli 2020

Ayub Ahmad Arnanto

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR GRAFIK | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 2 |
| 1.4. Kerangka Pemikiran | 3 |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Teori Perdagangan Internasional | 5 |
| 2.2. Teori Permintaan | 7 |
| 2.3. PDB Per Kapita | 9 |
| 2.4. Nilai Tukar | 10 |
| 2.5. Kebijakan Penenggelaman Kapal | 11 |
| 2.6. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN | 14 |
| 3.1. Metode Penelitian | 14 |
| 3.2. Data dan Sumber Data | 14 |
| 3.3. Uji Asumsi Klasik | 15 |
| 3.4. Objek Penelitian | 16 |
| 3.4.1. Nilai Ekspor Perikanan Tangkap Indonesia | 16 |
| 3.4.2. PDB Per Kapita Negara Importir | 17 |
| 3.4.3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD | 17 |
| 3.4.4. Harga Perikanan Tangkap | 18 |
| 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 20 |
| 4.1. Hasil Pengolahan Data | 20 |
| 4.2. Uji Penggunaan <i>Common Effects Model, Fixed Effect</i> | |

| | |
|--|-----|
| <i>Model</i> , dan <i>Random Effects Model</i> | 21 |
| 4.2.1. Uji <i>Redundant Likelihood Ratio</i> | 21 |
| 4.2.2. Uji Hausman | 22 |
| 4.3. Uji Asumsi Klasik | 22 |
| 4.3.1. Uji Multikolinearitas | 23 |
| 4.3.2. Uji Heteroskedastisitas | 23 |
| 4.4. Koefisien Determinasi (<i>R-square</i>) | 24 |
| 4.5. Pembahasan | 25 |
| 5. PENUTUP | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA | 29 |
| LAMPIRAN | A-1 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | A-3 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran | 3 |
| Gambar 2. Konsep Dasar Teori Perdagangan | 7 |
| Gambar 3. Kurva Permintaan | 8 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Nilai Ekspor Perikanan Tangkap Indonesia (juta US\$) | 16 |
| Grafik 2. PDB per Kapita Negara Tujuan Ekspor (US\$) | 17 |
| Grafik 3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Tahun 2005-2019 | 18 |
| Grafik 4. Harga Perikanan Hasil Tangkap Tahun 2005-2019 | 19 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data dan Sumber Data yang Digunakan | 15 |
| Tabel 2. Hasil Regresi | 20 |
| Tabel 3. Hasil Pengujian <i>Redundant Likelihood Ratio</i> | 22 |
| Tabel 4. Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> | 22 |
| Tabel 5. Uji Multikolinearitas | 23 |
| Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas <i>Glejser</i> | 24 |

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut sebesar 5,8 juta km², terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km², luas perairan kepulauan seluas 2,95 juta km², dan luas zona ekonomi eksklusif seluas 2,55 juta km² (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Luasnya perairan laut Indonesia menjadikan sektor perikanan sebagai aspek penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut KKP (2018) pertumbuhan PDB sektor perikanan yaitu sebesar 6,79%. Pertumbuhan tersebut berada di atas PDB Nasional dan PDB sektor pertanian yaitu sebesar 5,03% dan 3,91%. Sektor perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 nilai ekspor perikanan tangkap menyumbang sebesar 252 juta USD, sedangkan nilai ekspor perikanan budidaya sebesar 209,7 juta USD (Badan Pusat Statistik, 2018).

Komoditas utama ekspor hasil perikanan tangkap Indonesia adalah tuna, cakalang-tongkol, kembung, tenggiri, kakap, teri, udang, kepiting dan rajungan. Dari sisi nilai, tuna, tongkol dan cakalang (TTC) ada di peringkat pertama yaitu sebesar 244 juta USD. Disusul oleh kepiting-rajungan dan udang hasil tangkap dengan nilai 45 juta USD dan 29 juta USD (KKP, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (2018) nilai ekspor perikanan hasil tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2011. Dimana Jepang menjadi negara importir perikanan tangkap terbesar dengan nilai mencapai 120 juta USD. Malaysia dan Singapura merupakan negara setelah Jepang yang menjadi penyumbang nilai ekspor terbesar. Kemudian disusul dengan Hongkong, Tiongkok, dan Amerika sebagai penyumbang ekspor perikanan tangkap terbesar bagi Indonesia.

Indonesia harus mengelola perairannya dengan baik agar dapat memaksimalkan potensinya. Namun sayangnya, kekayaan laut Indonesia belum mencapai potensi maksimumnya untuk menyejahterakan para nelayan dan pemasukan pendapatan negara. Salah satu penghambat upaya optimalisasi potensi kelautan adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*). Kerugian yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun (Dharanindra, 2016). Selain itu aktivitas penangkapan ikan *illegal* juga dapat merusak ekosistem laut dan memengaruhi keberlanjutan potensi tangkapan ikan di Indonesia. Ditambah dengan adanya keberadaan kapal-kapal asing tanpa izin yang terus mencuri dan

mengeksploitasi perairan Indonesia dapat mengakibatkan *overfishing* (Johns, 2013).

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia menyebabkan pemerintah melalui KKP membuat strategi kebijakan pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan penenggelaman kapal merupakan aksi negara dalam memberantas kegiatan perikanan *illegal* dan di samping itu untuk memberikan efek jera serta meningkatkan efek *deterrence* atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2016) sampai bulan Februari 2016 telah 153 kapal ikan ditenggelamkan, untuk kapal asing meliputi 20 kapal ikan dari Malaysia, 43 dari Filipina, 1 dari Tiongkok, 21 dari Thailand, 50 dari Vietnam, 2 dari Papua Nugini, 1 dari Belize, dan 1 Nigeria. Menurut Subarsono (2011) kebijakan yang telah direkomendasikan untuk ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya keberlanjutan perikanan juga tak sekadar dilihat dalam konteks ekobiologi, tetapi juga sosial ekonomi, baik industri perikanan khususnya meningkatkan ekspor maupun kesejahteraan nelayannya.

1.2 Rumusan Masalah

Maraknya aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di perairan laut Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi sektor perikanan khususnya produksi dan ekspor ikan hasil tangkap. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas IUUF melalui tindakan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut diberlakukan kepada kapal-kapal yang tertangkap melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Selain kebijakan penenggelaman kapal masih ada berbagai hal yang memengaruhi ekspor ikan tangkap Indonesia. Faktor-faktor lain yang memengaruhi ekspor ikan tangkap Indonesia adalah harga ikan hasil tangkap, PDB per kapita negara importir dan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

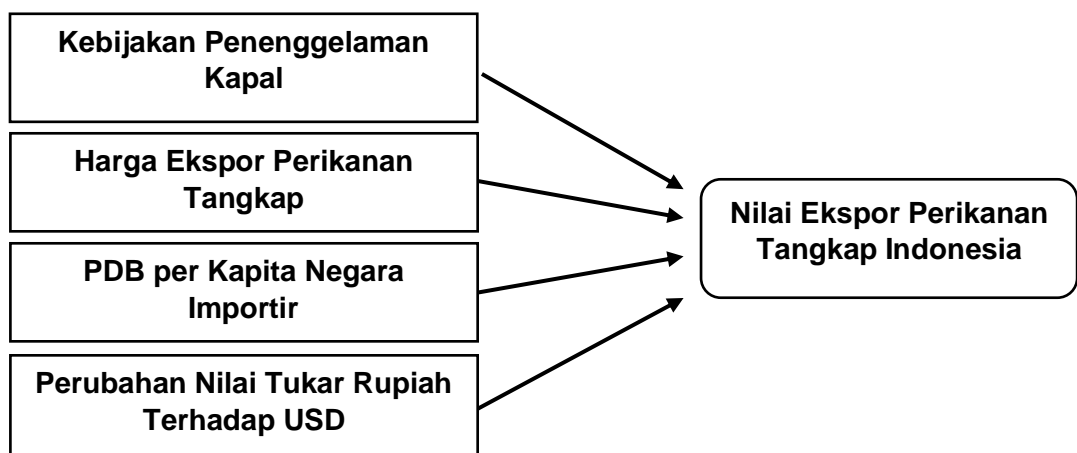
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh

kebijakan penenggelaman kapal terhadap nilai ekspor perikan tangkap Indonesia ke Malaysia, Singapura, Jepang, Tiongkok, Hongkong, dan Amerika. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana harga rata-rata ikan hasil tangkap, PDB per kapita negara importir dan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dapat memengaruhi nilai ekspor perikanan tangkap Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan penenggelaman kapal terhadap ekspor perikanan tangkap

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018) pencurian ikan telah merugikan Indonesia sebanyak 20 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal juga dapat merusak ekosistem laut dan memengaruhi keberlanjutan potensi tangkapan ikan di Indonesia. Keberadaan kapal-kapal asing tanpa izin yang terus mencuri dan mengeksploitasi perairan Indonesia dapat mengakibatkan *overfishing*. Menanggapi hal tersebut, salah satu upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut diberlakukan kepada kapal-kapal yang tertangkap melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dasar hukum bagi kebijakan tersebut telah dirumuskan sejak tahun 2009. Menurut Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasopati, 2015). Dalam hal ini, adanya

kebijakan penenggelaman kapal dinilai dapat berdampak positif terhadap nilai ekspor perikanan tangkap Indonesia.

Tingginya harga mencerminkan kelangkaan dari barang tersebut. Ketika sampai pada tingkat harga tertinggi, konsumen cenderung menggantikan barang tersebut dengan barang lain yang mempunyai hubungan dekat dan relatif lebih murah. Hukum penawaran menyatakan apabila semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Dalam hal ini, harga domestik rata-rata ikan tangkap dinilai menentukan keputusan importir terhadap volume ekspor ikan tangkap Indonesia.

PDB per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDB per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. PDB sering digunakan sebagai tolak ukur daya beli kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Jika semakin besar PDB per kapitanya, maka akan semakin makmur negara tersebut. Ketika PDB per kapita negara importir meningkat, negara tersebut cenderung untuk dapat meningkatkan volume impornya. Dalam hal ini, kenaikan PDB per kapita negara importir akan berdampak positif terhadap ikan tangkap Indonesia sebagai komoditi unggulan untuk diekspor.

Nilai tukar merupakan perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar dapat mengubah harga relatif suatu produk menjadi lebih mahal atau lebih murah sehingga nilai tukar terkadang digunakan sebagai alat untuk mendorong ekspor. Perubahan posisi ekspor inilah yang kemudian berguna untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan. Nilai tukar Rupiah terhadap USD memiliki hubungan yang positif terhadap ekspor ikan tangkap Indonesia, dengan kata lain semakin lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menyebabkan peningkatan ekspor ikan tangkap Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketika mata uang Rupiah mengalami depresiasi terhadap USD, maka negara importir akan mengimpor lebih banyak karena dinilai lebih murah serta menguntungkan untuk transaksi impornya.